

HARMONISASI KEBIJAKAN ADMINISTRASI NEGARA DALAM ERA DESENTRALISASI: TINJAUAN LITERATUR ATAS KONFLIK KEBIJAKAN PUSAT–DAERAH

Muhammad Farisan Kasyfi
Universitas Lambung Mangkurat
m.farisan.kasyfi@ulm.ac.id

Muhammad Gagah Dirgantara
Universitas Lambung Mangkurat
muhammadgagah95@ulm.ac.id

Abstract

Decentralisation is an important strategy in state administrative reform that aims to improve government efficiency, public service quality, and community participation. However, its implementation is often accompanied by policy conflicts between the central and regional governments and between regional governments, which results in policy fragmentation and weakens governance. This study aims to analyse the dynamics of central-regional policy conflicts in the era of decentralisation and examine the role of harmonising state administration policies in realising effective and accountable governance. This study uses a qualitative approach through a literature review of reputable scientific publications indexed by Scopus, with thematic analysis techniques to identify patterns, causal factors, and approaches to policy harmonisation. The results show that policy conflicts are mainly triggered by overlapping regulations, unclear division of authority, differences in political interests, and weak vertical and horizontal coordination mechanisms. Policy harmonisation has proven to play a strategic role in reducing policy conflicts by aligning the objectives, norms, and implementation of policies across levels of government without eliminating the principle of regional autonomy. This study provides a conceptual contribution to strengthening state administration and serves as a basis for developing coherent, effective, and accountable public policies in a decentralised government system.

Keywords: *Decentralisation; State Administration; Policy Harmonisation; Central-Regional Conflict; Governance*

Abstrak

Desentralisasi merupakan strategi penting dalam reformasi administrasi negara yang bertujuan meningkatkan efisiensi pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat. Namun, implementasinya sering kali diiringi oleh konflik kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar pemerintah daerah, yang berdampak pada fragmentasi kebijakan dan melemahnya tata kelola pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik kebijakan pusat daerah dalam era desentralisasi serta mengkaji peran harmonisasi kebijakan administrasi negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui tinjauan literatur terhadap publikasi ilmiah bereputasi yang terindeks Scopus, dengan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, faktor penyebab, dan pendekatan harmonisasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik kebijakan terutama dipicu oleh tumpang tindih regulasi, ketidakjelasan pembagian kewenangan, perbedaan kepentingan politik, serta lemahnya mekanisme koordinasi vertikal dan horizontal. Harmonisasi kebijakan terbukti berperan strategis dalam mengurangi konflik kebijakan dengan menyelaraskan tujuan, norma, dan implementasi kebijakan lintas level pemerintahan tanpa menghilangkan prinsip otonomi daerah. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual bagi penguatan administrasi negara dan menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan publik yang koheren, efektif, dan akuntabel dalam sistem pemerintahan desentralistik.

Kata Kunci: Desentralisasi; Administrasi Negara; Harmonisasi Kebijakan; Konflik Pusat–Daerah; Tata Kelola Pemerintahan